



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Tahun 2024



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pencapaian RENSTRA Tahun 2024 – 2026.

LKjIP Tahun Anggaran 2024 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dilaksanakan dan merupakan sumber informasi ke arah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui usaha keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pengawasan, target dapat dicapai dengan baik

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya saran untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	2
D. Isu Strategis.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Ikhtisar/ ringkasan Renstra/ Renja.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	29
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	31
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.....	37
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra.....	42
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standard Nasional.....	45
A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	51
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	52
A.7 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.....	54
B. Realisasi Anggaran.....	67
IV. PENUTUP.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)	

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Berdasarkan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

a) Fungsi

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati;
- h. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pememerintah Pusat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- b) **Susunan Dan Struktur Organisasi**
- Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
1. Inspektur
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Inspektur Pembantu I
 4. Inspektur Pembantu II
 5. Inspektur Pembantu III
 6. Inspektur Pembantu IV
 7. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Reformasi Birokrasi
 8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.

Bagan Susunan Organisasi :



Dari bagan struktur organisasi di atas, SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia (SDM) APIP
Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2024

No	NAMA	NIP	GOL	PEND.	JABATAN
1	Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si	19661005 198703 1 010	IV/d	S2	Inspektur Daerah
2	Drs. MOH. MIFTAQUL MUJIB, MM	19670315 199203 1 010	IV/b	S2	Inspektur Pembantu II
3	Drs. EKO CAHYONO, S.Sos. M.AP,	19670730 199302 1 003	IV/b	S2	Inspektur Pembantu III
4	FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM	19750803 199803 1 006	IV/b	S2	Inspektur Pembantu IV

No	NAMA	NIP	GOL	PEND.	JABATAN
5	SUDARMONO, AP, MM	19760213 199412 1 001	IV/b	S2	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, PPTK dan Reformasi Birokrasi
6	DWI TRISTANTI, SE,M.AP	19720302 20060 4 2 016	IV/a	S2	Inspektur Pembantu I
7	Dra. TITIK SUPRIHATIN, M.Si	19650530 199203 2 005	IV/b	S2	PPUPD Madya
8	SUTANTO ADI S, SE	19660620 199602 1 002	IV/b	S1	PPUPD Madya
9	RIZKY RUSMAWATI, S.STP, M.Si, CRMO	19850110 200312 2 002	IV/a	S2	Auditor Madya
10	LUTFI ASHARI, SE	19790307 200604 1 014	III/d	S1	Auditor Madya
11	INTAN ESY NURWAYA, ST	19800327 200903 2 004	III/d	S1	Auditor Madya
12	SRI SUDEWI, SE	19670205 198603 2 002	III/d	S1	Analisis Kebijakan Muda
13	IDA AYU DEWI, SE	19721113 200801 2 007	III/d	S1	Kasubbag Umum dan Keuangan
14	RENY PRIHASTUTI, SE	19720312 200604 2 027	III/d	S1	Auditor Muda
15	WAHYU DWIPRASETYA, SE	19791017 200901 1 006	III/d	S1	Auditor Muda
16	NURIMA JIWAYANTI, SH	19870910 201001 2 018	III/d	S1	Auditor Muda
17	NOVARINA DIAN WARDANI, SP	19781123 201001 2 002	III/d	S1	Auditor Muda
18	PIYA FHATORONI, S.Kom	19821021 201001 1 015	III/d	S1	Pranata Komputer Muda
19	SUMARYANA, SE	19710222 200604 1 008	III/c	S1	PPUPD Muda
20	ARI WIDODO, SE	19840301 200604 1 008	III/c	S1	Auditor Muda
21	OKKY HAYU PAMUJA, S.STP, M.Si	19901016 201206 1 013	III/c	S2	Perencana Ahli Muda
22	MUNDARWATI, SE	19770908 201101 2 003	III/c	S1	Auditor Muda
23	ANAS NASRULLAH, A.Md	19820420 200903 1 006	III/c	S1	Auditor Muda
24	ABDUL HADI, A.Md	19800408 201101 1 008	III/b	D3	Pengelola Barang Milik Daerah
25	ZANUAR ACHMAD AFANDI, S.Akun	19910102 201903 1 009	III/b	S1	Auditor Pertama
26	HENI PURWANTI, SE, CGAA	19841102 201903 2 011	III/b	S1	Auditor Pertama
27	DENADA ANGGIA LALITA, SE, CGAA	19841017 201903 2 011	III/b	S1	Auditor Pertama
28	SHINTA MEIGA MAYANGSARI, SE	19890515 202012 2 004	III/b	S1	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
29	RIZKI SEPTIANI, SE	19970909 202012 2 007	III/b	S1	Auditor Pertama
30	GAGOT SULISTYO, S.Ak	19960728 202012 1 004	III/b	S1	Bendahara Pengeluaran
31	ZAM PERMITASARI, S.Ak	19970829 202012 2 004	III/b	S1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
32	KARTIKA IKA WULANDARI, SE	19940127 202012 2 006	III/a	S1	Auditor Pertama
33	SAKA RAHARDIAN, ST	19920910 202203 1 003	III/a	S1	Auditor Pertama
34	FESTYAGUSTI HARDIKASARI, ST	19890801 202203 2 001	III/a	S1	Auditor Pertama
35	WIRAWAN YUDA PRIHATAMA, ST	19931009 202203 1 001	III/a	S1	Auditor Pertama
36	RIZKI NURUL FADHILAH, A.Md.T	19980327 202203 2 006	II/c	D3	Auditor Pelaksana
37	BAROKAH SAKTI SATRI W, A.Md	19950406 202203 1 002	II/c	D3	Auditor Pelaksana
38	RIDHO AGUNG LAKSONO, A.Md. Ars	19980801 202203 1 002	II/c	D3	Auditor Pelaksana
39	ARIQ HASYEMI RAFSANJANI, A.Md.t	19990613 202203 1 002	II/c	D3	Auditor Pelaksana
40	AGI WAHYU SALINDRA, A.Md.Ak.	19970611 202203 1 002	II/c	D3	Auditor Pelaksana

No	NAMA	NIP	GOL	PEND.	JABATAN
41	APRILIA FAJAR ADHANI, A.Md	19770418 202203 2 004	II/c	D3	Auditor Pelaksana
42	DINA JUANITA TRI SANTI, A.Md	19960624 202203 2 003	II/c	D3	Auditor Pelaksana
43	LAILA KHOTAMIL NUR AZIZAH, A.Md	19951018 202203 2 005	II/c	D3	Auditor Pelaksana
44	CHUSNUL KHOIRIYAH, A.Md	19950526 202203 2 006	II/c	D3	Auditor Pelaksana
45	ARMILA MAZIDATUR ROSYIDAH, A.Md	19941214 202203 2 002	II/c	D3	Auditor Pelaksana
46	YOLANDA AFRIYANTI, A.Md	19920402 202203 2 002	II/c	D3	Auditor Pelaksana
47	NINDYA YULAQFITA RIFAMATU FIRIZKI, A.Md.T	19990729 202203 2 004	II/c	D3	Auditor Pelaksana
48	JONO	197112252007011019	II/c	SLTA	Pengemudi
49	SARIJO	19811230 202001 1 003	II/b	SLTA	Pengadministrasi Umum

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2024

TABEL 1.2
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-laki	Perempuan
A.	Status Kepegawaian			
	- ASN	49	24	25
	- THL	11	5	6
	Jumlah	62	31	31
B.	Pendidikan ASN			
	- Magister (S2)	9	6	3
	- Sarjana (S1)	25	11	14
	- Sarjana Muda/Diploma III	13	5	8
	- Diplioma II	0	0	0
	- Diploma I	0	0	0
	- SLTA	2	2	0
	- SLTP	0	0	0
	- SD	0	0	0
	Jumlah	49	24	25
C.	Pendidikan THL			
	- Sarjana (S1)	7	1	6
	- SLTA	4	4	0
	Jumlah	11	5	6
D.	Pangkat dan Golongan			
	- Pembina Utama Madya (IV/d)	1	1	0
	- Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0
	- Pembina Tk. I (IV/b)	6	5	1
	- Pembina (IV/a)	2	0	2
	- Penata Tk. I (III/d)	9	3	6
	- Penata (III/c)	5	4	1
	- Penata Muda Tk. I (III/b)	8	3	5
	- Penata Muda (III/a)	4	2	2
	- Pengatur Tk. I (II/d)	0	0	0
	- Pengatur (II/c)	13	5	8
	- Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	0
	- Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
	- Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
	- Juru (I/c)	0	0	0
	- Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
	- Juru Muda (I/a)	0	0	0

Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-laki	Perempuan
		49	24	25
E	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	1	1	0
	- Eselon III	5	4	1
	- Eselon IV	1	0	1
		7	5	2
F.	Pejabat Fungsional			
	1. JFA :			
	Auditor Madya	3	1	2
	Auditor Muda	7	3	4
	Auditor Pertama	8	3	5
	Auditor Pelaksana	12	4	8
		30	11	19
	2 PPUPD :			
	PPUPD Madya	2	1	1
	PPUPD Muda	1	1	0
		3	2	1
	- Perencana Muda	1	1	0
	- Analis Kebijakan Muda	1	0	1
	- Pranata Komputer Muda	1	1	0
	Jumlah	36	14	22
G.	Jabatan Pelaksana			
	- Pelaksana	6	4	2
	Jumlah	6	4	2

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

d. Isu-isu Strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP juga mempunyai tugas melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan penjaminan kualitas perencanaan tingkat Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah
2. Kompetensi pegawai khususnya pada SATGAS-SPIP struktur pengelola risiko terkait manajemen risiko perlu ditingkatkan
3. Proses penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya memadai dan masih sebatas pemenuhan formal, karena belum dilakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko
4. Sebagian besar SKPD belum memiliki risk register terkait fraud/pencegahan korupsi

5. Kurang optimalnya koordinasi untuk peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan SPIP antar SKPD terkait yaitu dengan BAPPEDA, Sekretariat Daerah, BPKAD, BKPSDM, dan Inspektorat

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dirumuskan isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah, Unit Pengelola Risiko Perangkat Daerah dan Penjamin Kualitas dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi
2. Penyusunan Prosedur kerja (Tools) implementasi sistem pengawasan Daerah
3. Inovasi pengawasan daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

e. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 069/2195/411.000/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang,
- b. Landasan Hukum,
- c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- d. Isu-isu Strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi
- e. Sistematika Penulisan

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

- a. Ikhtisar/Ringkasan Rencana Strategi/ Rencana Kinerja Tahunan
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

- A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
- A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya
- A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra
- A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standard Nasional;
- A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
- A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- A.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja

Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindaklanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 sebagai pedoman menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Daerah periode Tahun 2024-2026 dan memerintahkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026

Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran yang memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2024 -2026 dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan”. Dari Tujuan tersebut ditentukan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel”.

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ditetapkan dengan perencanaan dalam jangka waktu 3 tahun atau disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) Periode Renstra 2024 -2026. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

disusun bertujuan untuk memberikan arah lebih baik bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dan sebagai ukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator dan target tujuan serta sasaran Inspektorat Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target		
					2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,111	3,150	3,200	3,250
2.		Meningkatnya kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	%	30%	30%	32%	32%

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2024-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai salah satu rujukan penting dalam rencana strategis, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Perangkat Daerah akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke depan dibutuhkan strategi atau langkah-langkah berisikan program – program sebagai prioritas Perangkat Daerah. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagai berikut

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Renstra
Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan
1	2
a. Meningkatkan penjaminan kualitas, tujuan, proses dan hasil sesuai manajemen risiko Perangkat Daerah dengan menyelesaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan baik Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Desa dengan memperhatikan risiko obyek pengawasan b. Meningkatkan kualitas SDM APIP yang berkompeten c. Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah d. Meningkatkan Internal Audit Capability Model (IACM)	a. - Meningkatkan pemantauan rekomendasi LHP BPK yang selesai ditindaklanjuti - Meningkatkan pemantauan tindak lanjut temuan internal yang selesai ditindaklanjuti - Asistensi dan pendampingan baik tingkat Perangkat Daerah hingga Pemerintahan Desa - Pengawasan secara berkala berpedoman pada pengelolaan risiko Pemerintah Daerah - Meningkatkan koordinasi dengan entitas - Meningkatkan penguatan kapasitas peran SATGAS SPIP-PD - Meningkatkan sinergitas antara APIP-APH - Pendampingan pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan pada Reformasi Birokrasi - Pendampingan unit menuju Zona Integritas b. Mengikutsertakan aparatur pengawas dalam peningkatan profesionalisme sebagaimana mandatory 120/jam/tahun c. - Memberikan pelayanan yang optimal di Internal Perangkat Daerah - Membuka Klinik Konsultasi baik pada Perangkat Daerah dan desa dengan mengedepankan kepuasan masyarakat d. Membangun Key Process Area (KPA) Kapabilitas APIP

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang mempedomani RPJPD Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan dengan indikator Nilai Maturitas SPIP serta sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dengan Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta Kinerja Target dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.3
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Indikati Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	82,5	85	13,815,000,000	87	13,484,000,000	89	13,435,500,000	89	40,734,500,000	Inspektorat
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	NA	14	53,000,000	14	58,000,000	14	62,000,000	42	173,000,000	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	-	2	8,000,000	2	10,000,000	2	12,000,000	6	30,000,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	-	7	15,000,000	7	18,000,000	7	20,000,000	21	53,000,000	
					Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu*)	laporan	7									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	NA	7	12,000,000	7	12,000,000	7	12,500,000	21	36,500,000	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	6	7,500,000	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	-	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	6	7,500,000	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	-	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	3	6,500,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	NA	63	9,643,000,000	63	9,646,000,000	63	9,648,000,000	189	28,937,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	-	55	9,500,000,000	55	9,500,000,000	55	9,500,000,000	55	28,500,000,000	
					Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN*)	bulan	12									
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	-	52	110,000,000	52	110,000,000	52	110,000,000	156	330,000,000	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	-	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	12	18,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	-	1	15,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000	3	53,000,000	
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu*)	laporan	1									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	-	6	12.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	18	36,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	NA	55	654,000,000	55	949,000,000	55	914,000,000	165	2,517,000,000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit	-	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	12	90,000,000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	-	110	37.000.000	110	42.000.000	110	47.000.000	330	126,000,000	
					Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan *)	orang	51									
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	-	55	7,000,000	55	7,000,000	55	7,000,000	165	21,000,000	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	-	45	400,000,000	45	500,000,000	45	500,000,000	45	1,400,000,000	
					APIP yang mengikuti pelatihan*)	orang	51									
					Terlaksananya senam secara rutin*)	bulan	11									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	55	60,000,000	55	70,000,000	55	80,000,000	55	210,000,000	(17)		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	-	55	120,000,000	55	300,000,000	55	250,000,000	55	670,000,000			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	-											
					Jumlah peserta bimtek*)	orang	120											
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	NA	51	888,000,000	51	1,032,000,000	51	1,075,000,000	153	2,995,000,000			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	-	2	20,000,000	4	25,000,000	6	30,000,000	12	75,000,000			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik*)	paket	1											
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	-	9	20,000,000	9	25,000,000	9	30,000,000	27	75,000,000			
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan*)	jenis	14											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	-	4	18,000,000	5	20,000,000	5	25,000,000	14	63,000,000			
					Jumlah kebutuhan alat rumah tangga *)	jenis	2											
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	-	5	180,000,000	6	190,000,000	6	200,000,000	17	570,000,000			
					Jumlah ATK yang diadakan*)	jenis	22											
					Tersedianya makan dan minum*)	bulan	11											
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	-	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	15	105,000,000			
					Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan*)	cetak dan penggandaan	15 cetak dan 15.209 lembar											
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	-	1	12,000,000	1	15,000,000	1	18,000,000	3	45,000,000			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	-	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	36	90,000,000			
					Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan *)	bulan	9											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	-	36	333,000,000	36	442,000,000	36	447,000,000	108	1,222,000,000		
					Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan*)	bulan	12										
					Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri*)	kegiatan	48										
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000		
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	unit	10	73	1,745,000,000	80	780,000,000	90	685,000,000	243	3,210,000,000		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	-	2	1,200,000,000	-	-	-	-	2	1,200,000,000		
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	-	40	125,000,000	45	130,000,000	50	135,000,000	135	390,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	-	30	250,000,000	35	650,000,000	40	550,000,000	105	1,450,000,000	
					Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan*)	buah	10									
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	1	170,000,000	-	-	-	-	1	170,000,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	NA	12	310,000,000	12	387,000,000	12	414,000,000	36	1,111,000,000	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	-	4	10,000,000	4	12,000,000	4	14,000,000	12	36,000,000	
					Jumlah surat yang diproses*)	surat	3386									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	-	4	200,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	12	700,000,000	
					Jumlah kebutuhan listrik dan telepon*)	bulan	12									
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	-	4	100,000,000	4	125,000,000	4	150,000,000	12	375,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Jumlah kebutuhan jasa kebersihan*)	bulan	12									
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	unit	54	94	510,000,000	105	620,000,000	109	625,000,000	308	1,755,000,000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	-	15	200,000,000	17	250,000,000	19	250,000,000	51	700,000,000	
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara*)	unit	15									
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	-	30	30,000,000	35	35,000,000	35	35,000,000	100	100,000,000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	-	45	80,000,000	48	85,000,000	50	90,000,000	143	255,000,000	
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara*)	unit	39									
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	-	4	200,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	14	700,000,000	
					Luas gedung kantor yang dipelihara*)	m2	1200									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Unsur SPIP	Persentas e (%)	60	60	1,055,000,000	70	1,285,000,000	80	1,415,000,000	80	3,755,000,000	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko	OPD	NA	30	275.000.000	35	310.000.000	35	335.000.000	35	920,.000.000	
					Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	Persentas e (%)	NA	100	190,000,000	100	225,000,000	100	260,000,000	100	675,000,000	
					Prosentase Jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	Persentas e (%)	NA	70	330,000,000	80	425,000,000	90	425,000,000	90	1,180,000,000	
					Prosentase Jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Persentas e (%)	NA	90	20,000,000	92	25,000,000	95	25,000,000	95	70,000,000	
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan	-	8	200,000,000	8	230,000,000	8	250,000,000	24	680,000,000
					Jumlah perangkat daerah yang diaudit dan dimonitor*)	OPD	9									
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	laporan	-	2	30,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	6	105,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Jumlah dokumen LPPD yang direviu*)	dokumen	1									
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	laporan	-	119	60,000,000	119	70,000,000	119	80,000,000	357	210,000,000	
					Jumlah dokumen LKPD yang direviu*)	dokumen	1									
					Jumlah dokumen RKA yang direviu*)	dokumen	50									
					Jumlah dokumen PBJ yang direviu*)	dokumen	65									
					Jumlah dokumen RKPD yang direviu*)	dokumen	2									
				Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	laporan	-	100	100,000,000	100	120,000,000	100	140,000,000	300	360,000,000	
					Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor*)	persentase (%)	81,66									
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	kesepakat an	-	1	75,000,000	1	80,000,000	1	85,000,000	3	240,000,000	
					Gelar pengawasan yang dilakukan*)	kali	1									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	dokumen	-	6	350,000,000	6	450,000,000	6	450,000,000	18	1,250,000,000	
					Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan*)	persentase (%)	96,66									
					Jumlah evaluasi yang dilakukan*)	kali	4									
					Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai*)	persentase (%)	90,33									
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	laporan	NA	8	240,000,000	8	300,000,000	8	370,000,000	24	910,000,000	
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	laporan	-	4	60,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	12	240,000,000	
					Pelimpahan kasus yang ditangani*)	Persentase (%)	80									
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	-	4	180.000.000	4	220.000.000	4	270.000.000	12	670.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Kasus pengaduan yang ditangani *)	Persentase (%)	93,33									
					Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor*)	obwas	20									
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	Persentase (%)	NA	10	875,000,000	15	1.090,000,000	20	1.130,000,000	20	3.095,000,000	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	kegiatan	NA	2	190,000,000	2	210,000,000	2	230,000,000	2	630,000,000	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	rekomendasi	-	1	70,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	3	240,000,000	
					Jumlah dokumen Pengawasan yang disusun*)	dokumen	1									
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	rekomendasi	-	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	3	390,000,000	
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan	OPD	NA	52	685,000,000	52	880,000,000	52	900,000,000	52	2,465,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					pendampingan dan asistensi											
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD	-	52	300,000,000	52	400,000,000	52	400,000,000	52	1,100,000,000	
					Evaluasi dan pemantauan SPIP*)	dokumen	33									
					Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi*)	dokumen	52									
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	OPD	-	52	60,000,000	52	90,000,000	52	100,000,000	52	250,000,000	
					Jumlah perangkat daerah yang didampingi*)	OPD	52									
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	kegiatan	-	3	250,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	9	850,000,000	
					Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi*)	OPD	14									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli*)	bulan	7									
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	OPD	-	52	75,000,000	52	90,000,000	52	100,000,000	52	265,000,000	
Jumlah								15,745,000,000		15,859,000,000		15,980,500,000		47,584,500,000		

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2024-2026

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

2.3 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu kepada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026. Di dalam Rencana Kerja Tahunan dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam satu tahun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 dituangkan pada setiap kegiatan, yang masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja. Target Kinerja Program/Kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4
 Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran
 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat	85 (Nilai)	85 (Nilai)	11.914.355.980	12.042.815.888
Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	6.01.01.2.01	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	50.302.000	50.302.000
2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	6.01.01.2.01.0001	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	28.560.000	28.560.000

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
3. Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0002	b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.903.500	4.903.500
		6.01.01.2.01.0003	c. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.068.500	5.068.500
		6.01.01.2.01.0006	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	11.770.000	11.770.000
		6.01.01.2.02	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53 Dokumen	53 Dokumen		7.874.357.000

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		6.01.01.2.02 0001	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	8.714.591.000	7.794.056.000
		6.01.01.2.02.0003	b. Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	52 Dokumen	58.680.000	71.280.000
		6.01.01.2.02.0005	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 Laporan	14.842.500	9.021.000
		6.01.01.2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	50.451.000	38.252.000
		6.01.01.2.03.0001	a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miiik Daerah	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.471.000	9.471.000
		6.01.01.2.03.0005	b. Rekonsialiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsialiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	16 Laporan	40.980.000	28.781.000

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		6.01.01.2.05	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55 Dokumen	55 Dokumen	560.462.620	1.002.416.620
		6.01.01.2.05.0009	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	45 Dorang	45 Orang	499.816.620	722.236.620
		6.01.01.2.05.0011	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55 Orang	55 Orang	60.646.000	280.180.000
		6.01.01.2.06	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	551.426.275	769.690.775
		6.01.01.2.06.0001	a. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	29.097.130	29.097.130
		6.01.01.2.06.0002	b. Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	5 Paket	5 Paket	13.902.600	13.902.600

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
			Perlengkapan Kantor	Kantor yang disediakan				
		6.01.01.2.06.0003	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	4 Paket	16.759.000	21.002.000
		6.01.01.2.06.0004	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	188.706.195	188.690.195
		6.01.01.2.06.0005	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	32.478.850	32.478.850
		6.01.01.2.06.0006	f. Penyediaan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bacaan dan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000
		6.01.01.2.06.0008	g. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.032.500	15.970.000
		6.01.01.2.06.0009	h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	246.450.000	406.550.000

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		6.01.01.2.06.0011	i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	0	50.000.000
		6.01.01.2.07	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah yang disediakan	73 Unit	188 Unit	1.006.694.285	1.160.916.793
		6.01.01.2.07.0005	a. Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	85 Unit	103 Unit	261.335.250	363.789.925
		6.01.01.2.07.0006	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	76 Unit	89 Unit	745.359.035	797.126.868
		6.01.01.2.08	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	221.800.000	218.100.000
		6.01.01.2.08.0001	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	6.300.000
		6.01.01.2.08.0002	b. Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi,	4 Laporan	4 Laporan	114.600.000	114.600.000

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
			Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik				
		6.01.01.2.08.0004	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan	97.200.000	97.200.000
		6.01.01.2.09	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	94 Unit	94 Unit	685.106.300	928.780.700
		6.01.01.2.09.0002	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	12 Unit	12 Unit	197.606.200	210.715.600
		6.01.01.2.09.0005	b. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	45 Unit	45 Unit	15.750.000	15.750.000

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		6.01.01.2.09.0006	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	161 Unit	161 Unit	95.356.100	135.356.100
		6.01.01.2.09.0009	d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	376.394.000	566.959.000
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60%	60%	741.659.162	703.500.462
		6.01.02.2.01	1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	90%	90%	663.924.162	625.765.462
				Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	70%	70%		
				Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	100%	100%		

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko	30 OPD	30 OPD		
		6.01.02.2.01.0001	a. Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	215.514.000	186.114.000
		6.01.02.2.01.0003	b. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	30.270.000	30.270.000
		6.01.02.2.01.0004	c. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	119 Laporan	119 Laporan	79.518.000	79.518.000
		6.01.02.2.01.0005	d. Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil Pengawasan Desa	100 Laporan	100 Laporan	60.000.000	60.000.000
		6.01.02.2.01.0006	e. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	32.610.302	20.410.302
		6.01.02.2.01.0007	f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	246.011.860	249.453.160

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		6.01.02.2.02	2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan	8 Laporan	8 Laporan	77.735.000	77.735.000
		6.01.02.2.02.0001	a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	4 Laporan	4 Laporan	14.000.000	14.000.000
		6.01.02.2.02.0002	b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	4 Laporan	63.735.000	63.735.000
		6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Froud Control Planing)	10%	10%	1.072.005.000	1.057.688.500
		6.01.03.2.02	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	209.810.000	290.797.000
		6.01.03.2.02.0001	a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	120.560.000	185.347.000

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				pengawasan yang disusun				
		6.01.03.2.02.0002	b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	89.250.000	105.450.000
		6.01.03.2.02	2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendmpingan dan asistensi	52 OPD	52 PD	862.195.000	766.891.500
		6.01.03.2.02.0001	a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	52 OPD	52 PD	432.718.000	323.789.500
		6.01.03.2.02.0002	b. Pendampingan, Asistensi, Verivikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verivikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52 OPD	52 PD	46.670.000	46.670.000
		6.01.03.2.02.0003	c Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta	3 Kegiatan	3 Kegiatan	349.107.000	375.582.000

Sasaran Strategis	Indikator	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
			Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				
		6.01.03.2.02.0004	d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52 OPD	52 PD	33.700.000	20.850.000
JUMLAH							13.728.020.142	13.804.004.850

Sumber : DPA dan DPAP Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2024

b. Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Di dalam Rencana Kerja ditetapkan target capaian kinerja tahun berjalan untuk seluruh indikator kinerja dan dituangkan/diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Pj. Bupati Nganjuk untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Nganjuk TA. 2024 sebesar Rp. 13.783.858.142,00 dan Pada APBD Perubahan TA 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk manambah 1 Sub Kegiatan yaitu dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD, sehingga Pada APBD-P 2024 Inspektorat menyelenggarakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan sebesar Rp. 13.804.004.850 . Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan anggaran yang menyesuaikan dengan kegiatan guna mencapai kinerja yang ditetapkan.

Sasaran, indikator kinerja dan target yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta anggarannya sebagaimana Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30 %
2	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemeirntah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	3 (3,000)
3	Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerag	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	11.970.193.980	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	663.924.162	DAU
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.072.005.000	DAU
	Jumlah	13.783.858.142	

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30 %
2	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemeirntah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	3 (3,000)
3	Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	12.042.815.888	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	625.765.462	DAU
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.057.688.500	DAU
	Jumlah	13.804.004.850	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Diakhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumberdaya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengukuran target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	3,150	3,862*	122,60%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
2.	Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30%	32%	106,66%
	2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	3 (3,000)	3 (3,000)	100%
	3. Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	81,70	96,11%

*) Hasil Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Analisis capaian kinerja tujuan dan kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Tujuan dengan indikator Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan data pada tabel 3.1 capaian kinerja tahun 2024 dalam pencapaian tujuan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik melalui kualitas pengawasan dengan indikator Nilai Maturitas SPIP dengan target 3,150 realisasi 3,862 Capaian 122,60%. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 telah dilaksanakan dan laporan atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP telah disampaikan ke BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi namun hasil evaluasi oleh BPKP s.d 31 Desember 2024 belum terbit sehingga hasil yang dilaporkan merupakan hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Periode Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Berdasarkan timeline tersebut Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas oleh K/L/D dilaksanakan paling lambat 30 Juni Tahun 2024, dan dilanjutkan dengan tahapan evaluasi oleh Kedeputan dan Perwakilan BPKP. Namun Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP mundur dari jadwal yang ditetapkan disebabkan aplikasi SPIP mengalami *trouble*

sebagaimana dalam surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tanggal 17 Oktober 2024 Nomor PE.08.02/S-3843/PW13/3/2024 Hal Penyelesaian Penilaian maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Adapun tahapan yang telah dilaksanakan dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dalam pencapaian tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik melalui Kualitas Pengawasan” sebagai berikut :

No	Tahap	Kegiatan	Realisasi
1	Tahap Persiapan	1) Pembentukan Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas Penentuan Objek	Juni 2024 (sudah)
		2) Penentuan Objek a. Pemilihan Satker Wajib b. Pemilihan Satker Penanggungjawab c. Penyusunan dan Pemaparan Rencana Rencana Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP	a. bulan Juni (sudah) b. bulan Juni (sudah) c. bulan Juni (Sudah)
2	Tahap Pelaksanaan	a. Pengumpulan dan pengujian Bukti b. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan c. Penilaian atas komponen struktur dan proses d. Penilaian atas komponen pencapaian tujuan	a. bulan Juni 2024 b. bulan Oktober 2024 c. bulan Oktober 2024 d. bulan Oktober 2024
3	Tahap Pelaporan	a. Penyusunan Laporan b. Penyampaian Laporan	a. Bulan November 2024 b. Bulan November 2024
4	Tahap Pemantauan Tindak Lanjut	Rencana Aksi AOI	belum

2. Capaian kinerja Sasaran

Sesuai Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 menetapkan 1 (satu) sasaran yakni Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP sesuai Standart dengan target 30% di tahun 2024. Untuk mewujudkan target kinerja sasaran di tahun 2024 Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan 3 (tiga) sasaran dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Pj. Bupati Nganjuk. Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

2.1 Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP sesuai Standart

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Penilaian mandiri SPIP dilakukan terhadap **seluruh** satker pada K/L/D, sedangkan Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap **satker wajib** berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan **satker penanggung jawab** perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengawasan internal.

Berdasarkan data pada tabel 3.1 Sasaran Inspektorat yaitu : "Meningkatnya Kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel " dengan indikator sasaran yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart dengan target 30 % dari jumlah perangkat daerah yang ada di pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Pada Tahun 2024 Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dilakukan oleh 50 Perangkat Daerah dan Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap 16 (Enam belas) Perangkat Daerah sehingga dari target 30% (15 OPD) terealisasi 32% dan capaian kinerja 106,66%.

Tahun 2024 Pemetaan Fokus/Sektor yang akan diuji dengan skema sebagai berikut :

- 1) Mulai dari penilaian mandiri, OPD sudah memiliki suatu fokus/sektor untuk dilakukan uji dan dilakukan penilaian SPIP Terintegrasi
- 2) Pemetaan focus/sektor yang akan diuji tiap-tiap OPD dilakukan oleh BAPPEDA (Selaku OPD Pengampu Perencanaan Daerah) berkoordinasi dengan seluruh OPD
- 3) Fokus/Sektor ini akan berlanjut digunakan untuk Penjaminan Kualitas dan Evaluasi (sesuai sampel) sehingga tidak ada evedince yang patah antara Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas serta Evaluasi
- 4) Focus/sektor ini berlanjut untuk Penjaminan Kualitas dan Evaluasi, focus/sektor evaluasi BPKP yang ditetapkan oleh rendal (Tahun 2024 pengentasan kemiskinan/penurunan prevalensi stunting dan 1 program unggulan daerah) harus sudah dipetakan diawal, karena akan dinilai mulai Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas dan Evaluasi.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan Kabupaten Nganjuk 2024 yang tercantum pada dokumen RPD yaitu "Pemantapan ketahanan perekonomian daerah dan kondisi masyarakat harmonis yang didukung SDM" serta fokus sektor yang akan diuji yaitu pengentasan

kemiskinan, penurunan prevelensi stunting dan program unggulan daerah, maka ditetapkan Perangkat Daerah yang dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP sebanyak 16 (enam belas) perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Fokus/Sektor	Perangkat Daerah
1	Pengentasan kemiskinan (wajib)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Dinas Sosial PPPA
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Dinas Tenaga Kerja
		Dinas Pendidikan
2	Percepatan penurunan stunting (wajib)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Dinas Kesehatan
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Pembangunan//pengembangan kawasan (Pilihan)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Pengelolaan Keuangan Daerah (Pilihan)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah
5	Penanganan Konflik sosial dan Tantibum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Akuntabilitas Birokrasi (Lainnya)	Inspektorat Daerah

2.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan table 3.1 realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Indikator Level Kapabilitas APIP Level 3 realisasi Level 3 Capaian Kinerja 100%

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien yang terdiri dari tiga unsur yang terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP.

Level Kapabilitas APIP diperoleh dari hasil evaluasi Penilaian Mandiri oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.03/LHP- 580/PW131612024 Tanggal 15 Agustus 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk, hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1 - 5) karakteristik *delivered* dengan rinciab sebagai berikut :

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0.54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan Entitas		3	3

2.3 Sasaran 3 : Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel 3.1 Sasaran Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah target Nilai 85 realisasi 81,70 Capaian 96,11%

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diperoleh dari Tim Evaluasi Internal Kabupaten Nganjuk. Nilai SAKIP Inspektorat pada tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor X.700/205/411.200/2024 memperoleh nilai 81,70 dengan kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,50
	Jumlah	100%	81,70

Realiasi kinerja sasaran 3 Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak mencapai target disebabkan terdapat beberapa kondisi yang belum ideal Sesuai hasil evaluasi tim internal SAKIP Kabupaten Nganjuk bahwa Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah tersedia namun belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dengan catatan yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut :

- a. Dalam menyusun pohon kinerja dalam pencapaian outcome kegiatan belum berdasarkan identifikasi *Critical Succes Faktor* (CSF) untuk mengidentifikasi factor-faktor kunci pembentuk dan pengurai masalah atau penyebab guna mencari factor pembentuk dan pengurai masalah atau penyebab agar dapat membantu dalam rangka mencapai target keberhasilan yang ditetapkan
- b. Inspektorat belum Menyusun Rencana Aksi belum menetapkan langkah-langkah konkret untuk mendorong sasaran yang telah ditetapkan

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya

Kinerja pembangunan daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan dengan indikator Nilai Maturitas SPIP merupakan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan tahun – tahun sebelumnya sebagai berikut :

a) Kinerja Tujuan

Realisasi kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022, 2023

No.	Tujuan	Indika tor Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturi tas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai Maturi tas SPIP	-	-	3,150	3,111	3,169	3,862*

*) Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP-T Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.1.2 kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan” dengan indikator kinerja “Level Maturitas SPIP” dengan target level 3 di tahun 2022 dan 2023 dan indikator kinerja tujuan “Nilai Maturitas SPIP di Tahun 2024” dengan target 3,150 terealisasi 3,862, sehingga capaian kinerja 122,60%. Maka pada tahun 2024 target indikator kinerja Level Maturitas SPIP dengan target nilai 3,150 **“Telah Tercapai”**

b) **Kinerja Sasaran**

Realisasi kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024
dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang mene rapkan SPIP sesuai standart	28%	32%	30%	28,84%	36%	32%
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern	Level Kapabilitas APIP	2 (2,000)	3 (3,000)	3 (3,000)	3 (2,900)	3 (3,000)	3 (3,000)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintah (APIP)							
3.	Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	85	82,50	81,55	81,70

Analisis capaian kinerja

1. Sasaran 1 : Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel” dengan indikator kinerja “persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart” adalah sebagai berikut :

Tahun 2022 Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart sebanyak 14 (Empat belas) Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas atas 33 OPD yang melaksanakan penilaian mandiri, sehingga realisasi tahun 2022 sebesar 36% dari target 32%(14 OPD) dan capaian kinerja sebesar 112,5%.

Tahun 2023 Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP Sesuai Standart yaitu sebanyak 18 (Delapan belas) Perangkat Daerah yang melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan Kualitas sehingga realisasi sebesar 36% dari target 32% dan capaian kinerja 112,5%.

Tahun 2024 Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP Sesuai Standart yaitu sebanyak 50 Perangkat Daerah yang melaksanakan penilaian mandiri dan dilaksanakan Penjaminan Kualitas sebanyak 16 Perangkat Daerah sehingga dari target 30% (15 OPD) terealisasi 32% (16 OPD) capaian kinerja 106,66%

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Level Kapabilitas APIP

Tahun 2022 Indikator Level Kapabilitas APIP target level 3 realisasi level 3 capaian 100%

Sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Nomor PE.09.03/LEV.1032/PW.13/6/2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Tahun

2022 menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 berada pada Level 3 dengan Skor 2,90 sebagaimana uraian berikut :

Tabel 3.1.2.1.1 Laporan Hasil Evaluasi PM Kapabilitas APIP Tahun 2022

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0.540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,100
Simpulan Entitas		3	2,900

Tahun 2023 Indikator Level Kapabilitas APIP target level 3 realisasi level 3 capaian 100%

Sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Nomor PE.09.03/LHP.1124/PW.13/6/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 menyimpulkan bahwa Level Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 berada pada Level 3 dengan Skor 3,000 sebagaimana uraian berikut :

Tabel 3.1.2.1.1 Laporan Hasil Evaluasi PM Kapabilitas APIP Tahun 2023

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0.540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Tahun 2024 Indikator Level Kapabilitas APIP target level 3 realisasi level 3 capaian 100% Sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Nomor PE.09.03/LHP.580/PW.13/6/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Tahun 2024 menyimpulkan bahwa Level Kapabilitas Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 berada pada Level 3 dengan Skor 3,00 sebagaimana uraian berikut :

Tabel 3.1.2.1.1 Laporan Hasil Evaluasi PM Kapabilitas APIP Tahun 2024

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0.540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

3. **Sasaran 3 : Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP**

Tahun 2022 dan 2023 indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak menjadi target sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, Walaupun tidak ada target Nilai SAKIP Perangkat Daerah di tahun 2022 dan 2023, sesuai Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023 SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk memperoleh nilai 82,50 di tahun 2022 dan 81,55 di tahun 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor X.700/205/411.200/2024 memperoleh nilai 81,70 dari target 85 capaian kinerja 96,11%. Target di tahun 2024 tidak tercapai disebabkan dokumen perencanaan yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik.

Berdasarkan uraian di atas realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dapat disimpulkan :

1. **Sasaran 1 : “Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel” dengan indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP Sesuai Standart”** Pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2022 realisasi sebesar 28,84%, tahun 2023 realisasi sebesar 36% dan tahun 2024 realisasi sebesar 32%. Fluktuasi naik turun capaian disebabkan karena faktor penentuan satker yang dinilai dalam Penjaminan kualitas disesuaikan dengan sasaran dan anggaran pemda. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri SPIP dilakukan terhadap **seluruh** satker pada K/L/D, sedangkan Penjaminan Kualiatas dilakukan terhadap **satker wajib** berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan **satker penanggung jawab** perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengawasan internal. Pemilihan satker wajib mempertimbangkan sasaran strategis yang paling mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan K/L/D . Pemilihan satker penanggung jawab mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal. Pemilihan satker wajib dan satker penanggung jawab mewakili 40% dari total anggaran K/L/D. Sehingga jumlah Satker yang dilakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP tergantung pada sasaran strategis pemerintah Daerah terpilih tahun berkenaan dan total anggaran.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator sasaran “Level Kapabilitas APIP”** capaian level kapabilitas APIP tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan atau bisa dikatakan stagnan.Namun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022, adapun elemen yang mengalami kenaikan skor yaitu Peran dan Layanan dari skor 1,100 pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,200 dan menjadikan APIP memperoleh level kapabilitas 3,000 pada tahun 2023 dan 2024.
3. **Sasaran 3 : Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP.**
Tahun 2022 dan 2023 indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak menjadi target sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk namun demikian realisasi Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami naik turun.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra (Renstra 2024 – 2026)

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Rentra		
		2024	2025	2026
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	3,150	3,200	3,250

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra		
		2024	2025	2026
Sasaran :				
1. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30%	32%	32%
2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	3 (3,000)	3 (3,100)	3 (3,250)
3. Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	87	89

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra menunjukkan perkembangan capaian kinerja Inspektorat terhadap target yang telah ditetapkan di akhir periode perencanaan strategis (2024-2026) Tabel 3.1.3.2 ini memperlihatkan posisi capaian indikator di tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir pada periode renstra (2024-2026).

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,250	3,862*	118,77%
2.	Sasaran : 1. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Persentase (%)	32%	32%	100%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Level Skor	3 (3,250)	3 (3,000)	100%
	3. Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	89	81,70	91,79%

Berdasarkan tabel 3.1.3.2 realisasi kinerja tujuan dan sasaran tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Realisasi kinerja tujuan** dengan indikator Nilai Maturitas SPIP dengan target di akhir renstra sebesar 3,250 realisasi tahun 2024 sebesar 3,862* capaian 118,77%. Dengan demikian target kinerja tujuan 2024 jika dibandingkan dengan target di akhir renstra telah tercapai
2. Realisasi Kinerja Sasaran:
 - a) **Sasaran 1:** Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Yang akuntabel dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP sesuai standart target akhir renstra 32% realisasi tahun 2024 sebesar 32% capaian 100%.
Target kinerja sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Yang akuntabel tahun 2024 jika dibandingkan target di akhir renstra telah tercapai
 - b) **Sasaran 2:** Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan indicator Level Kapabilitas APIP target akhir renstra level 3 realisasi tahun 2024 level3 capaian 100%.
Target kinerja sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tahun 2024 jika dibandingkan target di akhir renstra telah tercapai
 - c) **Sasaran 3 :** Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah target akhir renstra nilai 89 realisasi tahun 2024 memperoleh nilai 81,70 capaian 91,79%

Target kinerja sasaran 3 : Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) tahun 2024 jika dibandingkan target di akhir renstra tidak tercapai.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standard Nasional

Dalam rangka melakukan evaluasi dan sebagai pembanding dalam upaya pencapaian target indikator tujuan yaitu Nilai Maturitas SPIP khususnya pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu melakukan pembandingan terhadap Maturitas SPIP dengan Standard Nasional. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 dengan Standart Nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Standard Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	-	3,862*)
2.	Sasaran : 1. Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	-	32%
	2. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	3	3
	3.Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	81,70

Berdasarkan tabel 3.1.4 realisasi kinerja tujuan dan sasaran tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan” dengan indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP” belum diperoleh nilai skor standart nasional karena

Laporan Hasil Evaluasi oleh BPKP belum keluar. Adapun Realisasi nilai maturitas SPIP berdasarkan hasil penilaian mandiri memperoleh skor 3,862. Karena Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tertintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai dengan laporan ini dibuat belum diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, maka sebagai perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standard nasional kami gunakan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2023.

Berikut surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/S.822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 28 Desember 2023
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP
di tempat

Memperhatikan surat kami nomor: DL.04/S-613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor: PE.09.03/S-782/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Urutan	Populasi	Hasil Evaluasi									
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%
Provinsi											
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,96%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%
3) EPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%
Kabupaten/Kota											
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%
3) EPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran 1 dan 2.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,
Raden Suhartono

- Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Utama BPKP
 2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
 3. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
 4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
 5. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.



PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
224	PW/13	17	Kabupaten Gubung	3.250	3	2.913	2	2.890	2	3.000	3
225	PW/13	18	Kota Probolinggo	3.243	3	2.939	2	2.860	2	3.000	3
226	PW/13	19	Kota Kediri	3.203	3	2.988	2	2.890	2	3.000	3
227	PW/13	20	Kabupaten Gresik	3.267	3	2.913	2	2.830	2	3.070	3
228	PW/13	21	Kabupaten Kediri	3.112	3	2.464	2	2.680	2	3.210	3
229	PW/13	22	Kabupaten Sidosarjo	3.150	3	2.813	2	2.830	2	3.000	3
230	PW/13	23	Kabupaten Pamekasan	3.247	3	2.951	2	2.930	2	3.000	3
231	PW/13	24	Kabupaten Sumenep	3.161	3	3.020	3	2.880	2	3.060	3
232	PW/13	25	Kota Madiun	3.282	3	2.886	2	2.890	2	3.000	3
233	PW/13	26	Kabupaten Magetan	3.203	3	2.788	2	2.770	2	3.000	3
234	PW/13	27	Kabupaten Trenggalek	3.100	3	2.782	2	2.880	2	2.620	2
235	PW/13	28	Kabupaten Ngawi	3.224	3	2.951	2	2.940	2	3.000	3
236	PW/13	29	Kabupaten Tuban	3.259	3	2.926	2	2.930	2	3.000	3
237	PW/13	30	Kabupaten Madiun	3.304	3	2.989	2	2.930	2	2.710	2
238	PW/13	31	Kota Pasuruan	3.090	3	3.001	3	2.830	2	3.000	3
239	PW/13	32	Kota Batu	3.277	3	3.076	3	2.930	2	2.900	2
240	PW/13	33	Kabupaten Nganjuk	3.169	3	3.038	3	2.790	2	3.000	3
241	PW/13	34	Kabupaten Jember	3.059	3	2.676	2	2.440	2	2.910	2
242	PW/13	35	Kabupaten Sampang	3.157	3	3.010	3	2.630	2	3.000	3
243	PW/13	36	Kabupaten Mojokerto	3.161	3	2.775	2	2.440	2	3.000	3
244	PW/13	37	Kabupaten Malang	3.233	3	3.000	3	2.860	2	3.000	3
245	PW/13	38	Kabupaten Bangkalan	3.146	3	2.907	2	2.660	2	2.900	2
14											
246	PW/14	1	Kota Pontianak	3.354	3	3.060	3	2.360	2	3.000	3
247	PW/14	2	Kabupaten Landak	3.207	3	3.123	3	2.620	2	3.000	3
248	PW/14	3	Kabupaten Sintang	3.238	3	3.103	3	2.870	2	3.000	3
249	PW/14	4	Kabupaten Sanggau	3.070	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
250	PW/14	5	Kabupaten Kubu Raya	3.020	3	3.013	3	2.730	2	3.000	3
251	PW/14	6	Kota Singkawang	3.261	3	3.118	3	2.930	2	3.000	3
252	PW/14	7	Kabupaten Mempawah	3.176	3	3.130	3	2.850	2	3.000	3
253	PW/14	8	Kabupaten Sekadau	3.100	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
254	PW/14	9	Kabupaten Ketapang	3.340	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
255	PW/14	10	Kabupaten Kapuas Hulu	3.010	3	2.000	2	2.000	2	3.000	3
256	PW/14	11	Kabupaten Melai	2.814	2	2.434	2	2.862	2	3.000	3
257	PW/14	12	Kabupaten Kayong Utara	2.220	2	2.000	2	2.000	2	3.000	3
258	PW/14	13	Kabupaten Bengkayang	2.200	2	2.000	2	1.800	1	2.710	2
259	PW/14	14	Kabupaten Sambas	3.028	3	2.870	2	2.360	2	3.000	3
15											
260	PW/15	1	Kabupaten Kotawaringin Barat	3.072	3	2.800	2	2.780	2	3.000	3
261	PW/15	2	Kabupaten Kotawaringin Timur	3.029	3	2.613	2	2.638	2	3.000	3
262	PW/15	3	Kabupaten Lamandau	3.066	3	2.878	2	2.910	2	3.000	3
263	PW/15	4	Kota Pangkajene	3.092	3	2.680	2	2.730	2	3.000	3
264	PW/15	5	Kabupaten Pulau Pisau	3.034	3	2.650	2	2.708	2	2.440	2
265	PW/15	6	Kabupaten Bontol Selatan	3.001	3	2.413	2	2.820	2	3.000	3
266	PW/15	7	Kabupaten Gunung Mas	3.064	3	2.750	2	2.910	2	3.000	3
267	PW/15	8	Kabupaten Bontol Utara	3.087	3	2.838	2	2.910	2	3.030	3
268	PW/15	9	Kabupaten Bontol Timur	3.067	3	2.819	2	2.838	2	2.480	2
269	PW/15	10	Kabupaten Sukamara	3.066	3	2.831	2	2.910	2	3.000	3

- Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart yaitu tercapai 32% tidak dapat dibandingkan dengan pemerintah Daerah lainnya atau standart nasional dikarenakan nilai SPIP dari BPKP belum keluar.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Indikator Sasaran Level kapabilitas APIP, Pada Tahun 2024 Inspektorat memperoleh level 3 berdasarkan hasil evaluasi jenjang pertama atas penilaian mandiri kapabilitas PIP Inspektorat Nganjuk BPKP Nomor PE.09.03/SP-4306/PW13/6/2024 Tanggal 14 November 2024 Adapun level kapabilitas Inspektorat jika dibandingkan dengan Kabupaten yang berbatasan adalah sebagai berikut kami lampirkan LHE Kabapilitas APIP Kota Kediri:

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8670360-2 Faksimile (031) 8670911
e-mail apip@bdkp.go.id website: <https://www.bdkp.go.id>

Nomor

PE 09/03/SP-4306/PW13/6/2024

14 November 2024

Hal

Laporan Hasil Evaluasi Jengjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP Level 3 Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Yth. Bupati Nganjuk
di Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APiP Inspektorat Kabupaten Nganjuk sebagaimana Laporan Penawakan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE 09/03/LHP-580/PW13/6/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APiP pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1 – 5), karakteristik delivered, dengan simpulan per elemen kapabilitas APiP sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Gb. LHE Kapabilitas APiP Kab.Nganjuk

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8670360-2 Faksimile (031) 8670911
e-mail apip@bdkp.go.id website: <https://www.bdkp.go.id>

Nomor

PE 09/03/SP-4276/PW13/6/2024

12 November 2024

Hal

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP pada Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024

Yth. Walikota Kediri
di Kediri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APiP Inspektorat Kota Kediri sebagaimana Laporan Penawakan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE 09/03/LHP-626/PW13/6/2024 Tanggal 03 September 2024 hal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP pada Kota Kediri Tahun 2024

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APiP pada lingkungan Inspektorat Kota Kediri Tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,29 (skala 1 – 5), karakteristik delivered, dengan simpulan per elemen kapabilitas APiP sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,63
2.	Praktik Profesional	3	0,63
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,21
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,44
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,29

Gb. LHE Kapabilitas API Kota Kediri

Dari Laporan Hasil Evaluasi Atas PM Kapabilitas APiP yang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan maka dapat disimpulkan Inspektorat Kabupaten Nganjuk telah mencapai Level standar yaitu Level 3.

- Sasaran 3 : Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Jika dibandingkan dengan Perangkat Daerah dalam provinsi Jawa Timur, Inspektorat Terkategori A, dengan perbandingan nilai sebagai berikut

Tabel 3.1.5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

OPD	KATEGORI	NILAI
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	83,25
Sekretariat Daerah	A	82,75
Inspektorat Daerah	A	81,70
Dinas Pendidikan	A	81,65
Dinas Perhubungan	A	81,20
Sekretaris Dewan	A	80,60
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	80,60

OPD	KATEGORI	NILAI
BKPSDM	A	80,50
Dinas PPKB	A	80,50
Dinas Komunikasi dan Informatika	A	80,10
BPBD	A	80,05
BPKAD	A	80.05
Dinas Kepemudaan, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata	A	80.05
Dinas Pertanian	A	80,05
Dinas Sosial PPA	BB	78.35
BAPENDA	BB	77,45
Dinas Perkim	BB	75.65
Dinas Tenaga kerja	BB	75,65
Dinas PUPR	BB	75,00
SATPOL PP	BB	75,00
Kecamatan Jatikalen	BB	75,00
Kecamatan Tanjunganom	BB	74,40
Dinas Kesehatan	BB	74,30
Kecamatan Bagor	BB	73,35
Dinas DPMPSTSP	BB	72,90
Dinas KPP	BB	72,50
BAKESBANGPOL	BB	72.10
Kecamatan Sukomoro	BB	71,85
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB	71,70
BAPPEDA	BB	71.25
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	BB	71,25
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	BB	71.25
Kecamatan Baron	BB	70,65
Dinas Lingkungan Hidup	BB	70.60
Kecamatan Prambon	BB	70.45
Kecamatan Ngronggot	BB	70.10
Kecamatan Ngetos	BB	70,05
Kecamatan Kertosono	B	69.85
Kecamatan Wilangan	B	69.85
Kecamatan Sawahan	B	69.25
Kecamatan Lengkong	B	69.15
Kecamatan Patianrowo	B	67,25
Kecamatan Gondang	B	67,20

OPD	KATEGORI	NILAI
Kecamatan Berbek	B	66,85
Kecamatan Pace	B	66,80
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	B	66.40
Kecamatan Ngluyu	B	63,90
Kecamatan Nganjuk	B	61.05
Kecamatan Rejoso	B	60,70
Kecamatan Loceret	CC	55,50

Evaluasi SAKIP PD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023



A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	122,60	Tercapai
2.	Sasaran : 1. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	106,66	Tercapai
	2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	100%	Tercapai
	3. Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	96,11	Tidak Tercapai

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam merealisasikan kinerja tujuan dan kinerja sasaran Tahun 2024 tersebut antara lain :

- a) Memasukkan kegiatan pendampingan penilaian mandiri SPIP dan Penjaminan kuitas SPIP ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024
- b) Mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 kepada Asesor Pemda dan admin Pemda oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya Tanggal 5 dan 6 Juni 2024
- c) Melaksanakan Forum Group Discussion Asesor Pemda dan Admin Pemda Tanggal 11 Juni 2024.
- d) Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk 50 Asesor Perangkat Daerah dan Asesor Penjamin Kualitas oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Ruang Candi Lor Kabupaten Nganjuk Tanggal 12 dan 13 Juni 2024

- e) Melaksanakan Workshop bagi Asesor Dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tanggal 9 dan 10 Agustus 2024
- f) Melaksanakan pendampingan penilaian Mandiri Maturitas SPIP erintegrasi. terhadap 16 OPD terpilih
- g) Melaksanakan pendampingan penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah (RSP), Risiko Srategis Operasional (RSO) pada Perangkat Daerah
- h) Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Adapun Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mencapai target kinerja tujuan dan kinerja sasaran antara lain:

- a) Menginisiasi regulasi terkait pengelolaan risiko
- b) Komitmen Kepala Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk beserta seluruh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk merealisasikan target Maturitas SPIP Level 3.
- c) Koordinasi internal dan kompetensi APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang memadai.
- d) Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi Pembina yakni BPKP Perwakilan Jawa Timur dan Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk
- e) SDM telah memiliki sertifikasi Pelatihan SPIP.
- f) Melaksanakan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tepat waktu dan sesuai dengan jadwal dan arahan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- g) Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tepat waktu
- h) Dokumen perencanaan yang tersedia belum ideal

Hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Kurangnya komitmen level top manajemen terkait Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko.
2. Kesadaran pemilik risiko untuk mengidentifikasi risiko masih rendah.
3. Belum didukungnya kegiatan penyelenggaraan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.
4. Kurang optimalnya satgas SPIP dalam penyelenggaraan SPIP
5. Fungsi konsulting belum dimanfaatkan secara optimal
6. Aplikasi Sistem Penilaian Mandiri SPIP (*e-integrity*) belum stabil.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk didukung sumberdaya anggaran untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan sebesar Rp13.804.004.850,00 dengan realisasi sebesar Rp12.774.810.365,00 maka capaian kinerja anggaran sebesar 92,54%. Efisiensi penggunaan sumberdaya Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	122,60	92,54	30,06%
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	106,66	92,54	14,12%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	100%		
4	Sasaran 3 : Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	96,11		

Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tujuan dan kinerja sasaran yang “**Telah Tercapai**” dengan realisasi anggaran 92,54%, hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya anggaran yang disediakan untuk pencapaian tujuan pembangunan khususnya urusan pengawasan tahun 2024 telah digunakan dengan “**efektif dan efisien**”.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Analisa Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP						
	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85	81,70	96,11%
	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
	Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA]SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			c. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	7 Laporan	100%
			2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	53 Dokumen	64 Dokumen	120,75%
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 org/bulan	49 org/bulan	89,09%
			b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	63 Dokumen	121,15%
			c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	100%
			3. Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	7 Dokumen	19 Dokumen	271,42%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8
			a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miiik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokum en	3 Dokumen	150%
			b.	Rekonsialiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Lapora n	16 Laporan	100%
			4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	55 Dokum en	49 Dokumen	89,08%
			a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	42 orang	93,33%
			b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	49 Orang	89,09%
			5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	50 Dokum en	81 Dokumen	162%
			a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
			b.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
			c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	175%
			d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	300%
			e.	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah paket barang cetakan	2 Paket	6 Paket	300%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8
					dan Penggandaan	dan penggandaan yang disediakan		
			f.	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
			g.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
			h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	65 Laporan	180,56%
			i.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	188 Unit	193 Unit	102,66%
			a.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	103 Unit	107 Unit	103,88%
			b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	89 Unit	86 Unit	96,63%
			7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%
			a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	4 Laporan	100%
			b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8
			c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
			8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	94 Unit	138 Unit	146,81%
			a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	19 Unit	158,33%
			b.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	45 Unit	45 Unit	100%
			c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	161 Unit	70 Unit	43,48%
			d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	133,33%
			B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60%	100%	166,66%
			1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	90%	90,41%	100,45%
					Prostatase jumlah Rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	70%	94,87%	135,52%
					Jumlah PD yang menerapkan	30 OPD	50 OPD	166,67%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8
					manajemen risiko			
					Prsentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah yang direviu	100%	139%	139%
			a.	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	4 Laporan	4 laporan	100%
			b.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	2 Laporan	3 Laporan	150%
			c.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 Laporan	162 Laporan	136,13%
			d.	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 Laporan	50 Laporan	50%
			e.	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%
			g.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
			2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	8 Laporan	18 Laporan	225%
			a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 Laporan	4 Laporan	100%
			b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 Laporan	18 Laporan	450%
			C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Persentase Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan	10%	34,6%	346%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8
				PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Korupsi Yang Mencapai Target			
			1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
			a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
			b.	Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
			2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	52 OPD	52 OPD	100%
			a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	52 OPD	52 OPD	100%
			b.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	93 OPD	178,85%
			c.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	3 Kegiatan	16 Kegiatan	533%
			d.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi	52 OPD	52 OPD	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4			5	6	7	8
						Penegakkan Integritas			

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 12 (Duabelas) kegiatan. Dari 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. Hal ini berdampak pada pencapaian kinerja. Berikut Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1.7.1
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Nilai SAKIP Inspektorat	96,11%
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	89,09%
			Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	89,08%
2	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	166,66%
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal	90,41%
			Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%
			Program :		346%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub.Kegiatan
1	2	3	4	5	6
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Froud Control Planing(	
			Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100%
			Sub.Kegiatan : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	100%
			2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	100%
			Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses mendapatkn layanan pendampingan dan asistensi	100%
			Sub Kegiatan: 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	100%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mendukung capaian kinerja tujuan **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan”** dengan indikator **“Nilai Maturitas SPIP”**, Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Bimbingan Teknis / Sosialisasi / Workshop bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur kepada APIP dan Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 kepada Asesor Pemda dan admin Pemda di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya Tanggal 5 dan 6 Juni 2024
- 2) Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk 50 Asesor Perangkat Daerah dan Asesor Penjamin Kualitas

oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Ruang Candi Lor Kabupaten Nganjuk Tanggal 12 dan 13 Juni 2024

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan aparat pengawasan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP, Itjen Kemendagri maupun Itjen Kementerian teknis lainnya) maupun pemeriksaan eksternal (BPK) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan (SIP-WAS) dan Portal BPK <https://eauditee.bpk.go.id>.

Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu **60 hari kerja** setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kegiatan pemantauan tindak lanjut internal APIP dilaksanakan setiap triwulan sedangkan pemantauan tindak lanjut eksternal oleh BPK dilaksanakan setiap semester. Hasil Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Internal APIP tertuang dalam Laporan Evaluasi Berkala Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024 yang terbit setiap triwulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala tindak lanjut internal APIP. Sedangkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang diterbitkan oleh BPK diterima pemerintah daerah setiap semester setelah kegiatan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan didukung 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan antara lain :

3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

3.1.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan Tahun 2024 merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun Program Kerja Tahunan Pengawasan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan 2024. Penyusunan PKPT berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan APIP berfokus pada program atau kegiatan yang berpotensi memiliki risiko tinggi dan dapat mengidentifikasi risiko apa yang akan terjadi, sehingga program strategis pemerintah daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, dan tepat guna.

Hasil Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk (PKPT) Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/4/K/411.013/2024.

3.1.2 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

- Klinik Konsultasi Pengawasan

Klinik Konsultasi merupakan salah satu layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang berfungsi sebagai media konsultasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Objek Pengawasan, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk, terkait urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah apabila terjadi keragu-raguan, ketidaktahuan dan mengalami permasalahan pelaksanaan. Melalui deteksi dini terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan urusan OPD maupun Lembaga Masyarakat dapat diminimalisir. Klinik Konsultasi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan dengan offline maupun online (<https://sisultan.nganjukkab.go.id/>)

Klinik Konsultasi online yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak hanya menghadirkan Auditor dan PPUPD sebagai narasumber, namun juga menghadirkan narasumber dari dinas terkait dan APH.

3.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

3.2.1 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

- Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi

Dalam rangka mendukung tercapainya kinerja tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui

Kualitas Pengawasan dengan indikator Nilai Maturitas SPIP dan kinerja sasaran Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel dengan indikator Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP sesuai standart, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan :

- Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah dan 16 Perangkat Daerah terpilih
- Workshop bagi Asesor dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

- Pendampingan Penyusunan Register Risiko

Pendampingan Penyusunan Register Risiko bertujuan untuk membangun budaya sadar risiko dalam rangka mewujudkan manajemen risiko indeks level 3 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan membantu Komite Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan ROO Tahun 2025. Sesuai PKPT Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan pendampingan Penyusunan Register Risiko pada seluruh Perangkat Daerah sesuai hadapan masing-masing Irban.

- Pendampingan Penyusunan Risiko Operasional Organisasi (ROO)

Pendampingan Penyusunan Risiko Operasional Organisasi Tahun 2025 bertujuan untuk membangun budaya sadar risiko dalam rangka mewujudkan manajemen risiko indeks level 3 melalui kegiatan pendampingan penyusunan Risiko Operasional Organisasi tahun 2025. Sasaran pendampingan atas Risiko Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu Dokumen Risiko Operasional Organisasi (ROO) Perangkat Daerah Tahun 2025.

- Evaluasi Register Risiko

Sasaran dilaksanakannya evaluasi register risiko yaitu melakukan evaluasi atas keterbukaan dan ketepatan dalam pengungkapan risiko, penentuan nilai risiko yang terkait dengan tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan tujuannya adalah melakukan evaluasi atas dokumen risk register perangkat daerah yang selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

- Fasilitasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Tujuan dilaksanakannya Fasilitasi RTP :

- a. Membangun budaya sadar risiko dan meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
- b. Memberikan fasilitasi kepada seluruh unsur dalam struktur pengelola risiko, khususnya Koordinator Komite Risiko dan Unit Kepatuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/183/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2026.

• **Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP**

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien yang terdiri dari tiga unsur yang terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP. Sesuai Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.03/LHP-580/PW131612024 Tanggal 15 Agustus 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk, hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ada pada level 3 dengan sk ada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1 - 5) karakteristik *delivered*.

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0.54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan Entitas		3	3

b.2 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah, KPK membangun sebuah system (**jaga-id**) yang terintegrasi dan terkoneksi dengan KPK melalui MCP (Monitoring Centre for Prevention) untuk memonitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan Tata Kelola pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

MCP KPK Tahun 2024 merupakan salah satu kegiatan terencana Inspektorat Kabupaten Nganjuk dalam implementasi mitigasi atas risiko

korupsi melalui pemantauan perbaikan terhadap 8 (delapan) asepek area intervensi rawan korupsi. Capaian MCP KPK pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebesar 95,21% dari target 91% Capaian Kinerja 104,50%

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan pada Tahun Anggaran 2024 untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bersumber pada APBD Perubahan Kabupaten Nganjuk TA. 2024 sebesar Rp13.804.004.850,00 dengan realisasi sebesar Rp12.774.810.365 atau 92,54% Dengan rincian sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		12.042.815.888	11.401.221.465	641.594.423	94,67
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.302.000	31.630.000	18.672.000	62,88
a.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	28.560.000	21.710.000	6.850.000	76,02
b.	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	4.903.500	1.698.000	3.205.500	34,63
c.	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	5.068.500	3.332.000	1.736.500	65,74
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.770.000	4.890.000	6.880.000	41,55
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.874.357.000	7.516.749.751	357.607.249	95,46
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.794.056.000	7.437.451.751	356.604.249	95,42
b.	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.280.000	71.280.000	0	100,00
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.021.000	8.018.000	1.003.000	88,88

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan		Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
3	Administrasi Barang Milik Daerah		38.252.000	35.522.000	2.730.000	92,86
	a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miiik Daerah	9.471.000	6.751.000	2.720.000	71,28
	b.	Rekonsialiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.781.000	28.771.000	10.000	99,97
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.002.416.620	935.778.707	66.637.913	93,35
	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	722.236.620	670.795.707	51.440.913	92,88
	b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	280.180.000	264.983.000	15.197.000	94,58
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		769.690.775	697.013.624	72.677.151	90,56
	a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.097.130	28.979.615	117.515	99,60
	b.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.902.600	9.233.850	4.668.750	66,42
	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.002.000	16.352.750	4.649.250	77,86
	d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.690.195	174.926.286	13.763.909	92,71
	e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.478.850	31.819.250	659.600	97,97
	f.	Penyediaan Bacaan dan Perundang-undangan	12.000.000	10.810.000	1.190.000	90,08
	g.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.970.000	14.522.000	1.448.000	90,93
	h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.550.000	363.419.873	43.130.127	89,39
	i.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.000.000	46.950.000	3.050.000	93,90
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		1.160.916.793	1.149.417.250	11.499.543	99,01
	a.	Pengadaan Mebel	363.789.925	357.830.000	5.959.925	98,36
	b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	797.126.868	791.587.250	5.539.618	99,31

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan		Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		218.100.000	176.047.827	42.052.173	80,72
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	4.861.500	1.438.500	77,17
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.600.000	99.113.487	15.486.513	86,49
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.200.000	72.072.840	25.127.160	74,15
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		928.780.700	859.062.306	69.718.394	92,49
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.715.600	169.692.863	41.022.737	80,53
	b.	Pemeliharaan Mebel	15.750.000	15.373.500	376.500	97,61
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.356.100	111.722.075	23.634.025	82,54
	d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	566.959.000	562.273.868	4.685.132	99,17
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			703.500.462	567.250.900	136.249.562	80,63
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		625.765.462	520.878.700	104.886.762	83,24
	a.	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	186.114.000	161.335.500	24.778.500	86,69
	b.	Reviu Laporan Kinerja	30.270.000	9.032.000	21.238.000	29,84
	c.	Reviu Laporan Keuangan	79.518.000	47.451.250	32.066.750	59,67
	d.	Pengawasan Desa	60.000.000	55.650.000	4.350.000	92,75
	e.	Kerjasama Pengawasan Internal	20.410.302	19.325.000	1.085.302	94,68
	f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	249.453.160	228.084.950	21.368.210	91,43
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		77.735.000	46.372.200	31.362.800	59,65

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan		Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
	a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14.000.000	1.800.000	12.200.000	12,86
	b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	63.735.000	44.572.200	19.162.800	69,93
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1.057.688.500	806.338.000	251.350.500	76,24
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		290.797.000	186.726.000	104.071.000	64,21
	a.	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	185.347.000	94.750.000	90.597.000	51,12
	b.	Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	105.450.000	91.976.000	13.474.000	87,22
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		766.891.500	619.612.000	147.279.500	80,80
	a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	323.789.500	252.033.000	71.756.500	77,84
	b.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46.670.000	38.830.500	7.839.500	83,20
	c.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	375.582.000	308.283.500	67.298.500	82,08
	d.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20.850.000	20.465.000	385.000	98,15
JUMLAH			13.804.004.850	12.774.810.365	1.029.194.485	92,54

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun Anggaran 2024 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan sangat bervariasi dari persentase serapan anggaran tertinggi pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian. Verifikasi Keuangan SKPD dengan serapan 100% dan serapan terendah pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah sebesar 12,861%. Secara keseluruhan Tahun Anggaran 2024 dari pagu anggaran perubahan Rp13.804.004.850,00 realisasi sebesar Rp12.774.810.365,00 atau 92,54%. Sehingga Tahun 2024 terdapat efisiensi Rp1.029.194.485,00 atau 7,46%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sudah selaras dengan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas - tugas yang menjadi tanggungjawabnya selaku penyelenggara pengawasan internal dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2024 menetapkan :

1. Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP target Nilai 3,150.
2. Sasaran :
 1. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart target 30%
 2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Indikator Sasaran Level Kapabilitas APP target Level 3
 3. Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikatr Sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah 85.

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Inspektorat “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan” dengan indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP” target nilai 3,150 terealisasi 3,862* capaian kinerja 122,60%.

Nilai tersebut merupakan hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP dan telah dilaporkan ke BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk di evaluasi namun sampai dengan tanggal penyusunan laporan, hasil evaluasi belum diperoleh.

2. Capaian Sasaran 1: "Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel" dengan indikator kinerja "Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Sesuai Standart" dengan target 30% terealisasi sebesar 32% capaian kinerja 112,5%.
3. Capaian Sasaran 2 : Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Level Kapabilitas APIP dengan taget level 3 telah tercapai.
4. Capaian Sasaran 3 : Terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP perangkat Daerah tidak tercapai.
5. Realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program	Indikator Capaian Program	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85	81,70	96,11	12.042.815.888	11.401.221.465	94,67
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	60%	100%	166,66	703.500.462	567.250.900	80,63
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Froud Control Planing)	10%	34,6%	346%	1.057.688.500	806.338.000	76,24
JUMLAH						13.804.004.850	12.774.810.365	92,54

4.2 Permasalahan/hambatan dan Langkah yang diambil Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja :

Tabel 4.1.2 Permasalahan/ Hambatan dan Langkah Peningkatan Kinerja

No.	Permasalahan/Hambatan	Langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja
1.	Kurangnya komitmen level top manajemen terkait Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko	Melaksanakan FGD Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan Asesor Pemerintah Daerah
2.	Belum didukungnya kegiatan penyelenggaraan SPIP dimasing-masing Perangkat Daerah	Melaksanakan kegiatan Bimtek dan pendampingan guna membangun kesadaran Perangkat Daerah dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2.	Kurang optimalnya satgas SPIP dalam penyelenggaraan SPIP	Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk 50 Asesor Perangkat Daerah dan Asesor Penjamin Kualitas oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur
3.	Fungsi konsultasi belum dimanfaatkan secara optimal	Melakukan komunikasi secara efektif dengan Perangkat Daerah untuk menggali permasalahan dan memberikan solusi yang dihadapi Perangkat Daerah.
4.	Aplikasi Sistem Penilaian Mandiri SPIP (<i>e-integrity</i>) belum stabil.	Memonitoring dan evaluasi secara berkala atas aplikasi yang dikembangkan BPKP dan mengkoordinasikan dengan BPKP jika terdapat kendala atas Aplikasi SPIP

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, kritik dan saran kami jadikan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan laporan sehingga mampu memberikan informasi yang tepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan

Nganjuk, 11 FEB 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk



Drs. Mokhammad Yasin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010